Jendela PLS
https://doi.org/10.37058/jpls.vxxx

Volume 10 Issue 1
Juni 2025
Halaman 138-145

p-ISSN: 2541-7045
e-ISSN: 2745-3944

MODEL KEMITRAAN PKBM, DUNIA INDUSTRI, DAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

Asep Abdurrahman Hakim[1], Ansori[2], Lenny Nuraeni[3]
[1,2,3] Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi

Article Info

Article history:

Received July 16, 2024
Revised January 15, 2025
Accepted June 26, 2025

Keywords:

Multi-Stakeholder Partnership
Entrepreneurship
Education
Economic Empowerment

ABSTRACT

Strategic partnerships among Community Learning Centers (PKBM), industries, and governments play a critical role in empowering community economies through entrepreneurship education. This study aims to identify and develop an effective collaborative model that integrates multiparty efforts to support entrepreneurship training based on local needs. The research employed a qualitative-descriptive method with a case study approach at PKBM Attarbiyah, Arjasari District, Bandung Regency. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that collaboration involving industries in providing technology-based training, government support through policies and regulations, and PKBM as program facilitators effectively enhances learners' entrepreneurial skills and strengthens local economic ecosystems. This model resulted in a 40% increase in learners' economic independence through training tailored to local industrial demands. The implementation of this model underscores the importance of multiparty synergy in ensuring the sustainability of entrepreneurship education. These findings support the development of policies and practices in community education aligned with the goals of community-based economic empowerment.

ABSTRAK

Kemitraan strategis antara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dunia industri, dan pemerintah memegang peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan model kolaborasi efektif yang melibatkan multipihak dalam mendukung pelatihan kewirausahaan berbasis kebutuhan lokal. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus di PKBM Attarbiyah, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang melibatkan dunia industri dalam penyediaan pelatihan berbasis teknologi, dukungan pemerintah dalam kebijakan dan regulasi, serta PKBM sebagai fasilitator program dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan warga belajar dan memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Model ini menghasilkan peningkatan kemandirian ekonomi warga sebesar 40% melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri lokal. Penerapan model ini menunjukkan pentingnya sinergi multipihak untuk menciptakan keberlanjutan dalam pendidikan kewirausahaan. Kesimpulan ini mendukung pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan masyarakat yang sejalan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Ansori
Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi
Email: ansoryalb@ikipsiliwangi.ac.id

PENDAHULUAN

Pendidikan kewirausahaan telah menjadi elemen kunci dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan lokal (Judijanto et al., 2024). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memainkan peran strategis sebagai lembaga pendidikan nonformal dalam memberikan keterampilan kewirausahaan kepada masyarakat (Tohani, 2022). Namun, potensi PKBM sering kali kurang optimal karena keterbatasan sumber daya dan jaringan. Di sinilah peran kemitraan multipihak, termasuk dunia industri dan pemerintah, menjadi penting untuk menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendukung pengembangan kewirausahaan berbasis komunitas (Alfadri, 2023).

Pendidikan kewirausahaan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangun keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang mendukung individu dalam menciptakan dan mengelola usaha (Thomassen et al., 2020). Menurut Doh et al., (2019), kewirausahaan tidak hanya berkaitan dengan menciptakan peluang ekonomi tetapi juga dengan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Dalam konteks masyarakat, pendidikan kewirausahaan berfungsi untuk memberdayakan individu agar mandiri secara ekonomi dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal (Rashid, 2019). Kemitraan multipihak merupakan kolaborasi strategis antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, dunia industri, dan lembaga pendidikan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Teori triple helix yang dikembangkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff menjelaskan bahwa interaksi antara akademisi, industri, dan pemerintah menghasilkan inovasi yang berdampak luas (Galvao et al., 2019). Dalam konteks PKBM, kemitraan ini dapat memperluas akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Ansori, Hendriana, et al., 2024).

PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal yang fleksibel dalam menjangkau masyarakat di berbagai tingkatan. PKBM memiliki keunggulan dalam pendekatan berbasis komunitas, memungkinkan adaptasi program pelatihan sesuai kebutuhan lokal (Ansori, Alhadihaq, et al., 2024). Namun, keterbatasan dalam infrastruktur dan pendanaan sering kali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan secara efektif.

Permasalahan utama yang dihadapi PKBM dalam melaksanakan pendidikan kewirausahaan mencakup: 1) PKBM sering kekurangan fasilitas, pendanaan, dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kewirausahaan berbasis lokal; 2) Hubungan antara PKBM dengan dunia industri dan pemerintah belum terjalin secara optimal, sehingga akses terhadap teknologi, pelatihan, dan pendampingan menjadi terbatas; dan 3) Pendidikan kewirausahaan di PKBM belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelatihan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan pentingnya kemitraan dalam mendukung pendidikan kewirausahaan. Misalnya, studi oleh Awasthy et al., (2020)

menemukan bahwa kolaborasi antara dunia industri dan lembaga pendidikan meningkatkan keterampilan praktis peserta didik. Selain itu, penelitian oleh Galvão et al., (2020) menyebutkan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi dan pendanaan memainkan peran kunci dalam keberhasilan program pendidikan kewirausahaan di komunitas lokal. Namun, model kolaborasi yang spesifik dan terintegrasi dengan PKBM masih jarang dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengembangkan model kemitraan yang melibatkan PKBM, dunia industri, dan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi model kemitraan yang efektif antara PKBM, dunia industri, dan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan; 2) Menganalisis dampak kolaborasi multipihak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan; dan 3) Mengembangkan rekomendasi untuk memperkuat ekosistem pendidikan kewirausahaan berbasis komunitas.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pendidikan nonformal yang inovatif. Di tengah dinamika ekonomi global, masyarakat perlu dilengkapi dengan keterampilan kewirausahaan yang relevan. Kemitraan multipihak menawarkan solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan yang dihadapi PKBM dan memastikan keberlanjutan program pendidikan kewirausahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam mengembangkan kebijakan dan praktik pendidikan masyarakat berbasis kemitraan.

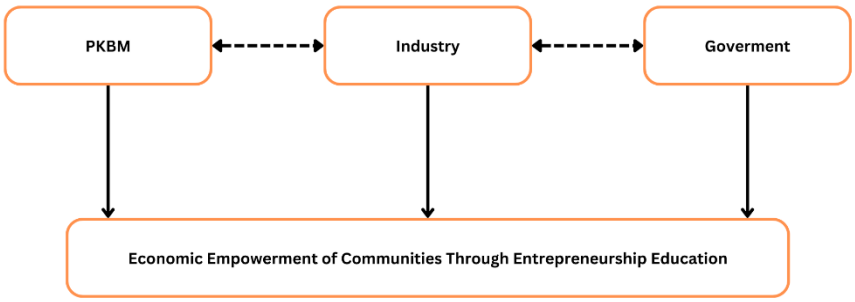

Figure 1. Partnership Model

Diagram alur tersebut menggambarkan hubungan kolaboratif antara PKBM, dunia industri, dan pemerintah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan. PKBM berperan sebagai fasilitator utama yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang disediakan oleh dunia industri dan pemerintah. Dunia industri memberikan kontribusi berupa pelatihan teknis, akses teknologi, dan peluang pasar bagi peserta didik. Sementara itu, pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi, pendanaan, dan kebijakan strategis untuk mendukung keberlanjutan program. Interaksi antar ketiga pihak ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pendidikan kewirausahaan yang sinergis, dimana hasil akhirnya adalah peningkatan keterampilan, produktivitas, dan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam interaksi antara PKBM, dunia industri, dan pemerintah dalam menciptakan model kemitraan yang efektif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik, tantangan, dan peluang kolaborasi multipihak di lokasi penelitian. Partisipan penelitian meliputi kepala PKBM, pengelola program, fasilitator pendidikan kewirausahaan, perwakilan dunia industri (manajer perusahaan lokal yang bermitra dengan PKBM), pejabat dari dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja yang terlibat, serta masyarakat lokal yang terdiri atas peserta didik dan alumni program kewirausahaan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih partisipan yang relevan berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam kegiatan kemitraan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan dari semua pihak terkait, observasi partisipatif terhadap pelaksanaan pelatihan kewirausahaan, serta dokumentasi berupa laporan program, *memorandum of understanding (MoU),* dan kebijakan pendukung dari pemerintah. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi metode, triangulasi sumber, dan member checking, dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan validitas temuan. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik, yang dimulai dengan reduksi data untuk mengidentifikasi tema-tema utama, penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram alur, serta penarikan kesimpulan berdasarkan teori kemitraan multipihak dan pendidikan kewirausahaan (Majumdar, 2022). Pendekatan ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pola kemitraan yang dapat diterapkan secara luas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pendidikan kewirausahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kemitraan antara PKBM, dunia industri, dan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan. Hasil penelitian disajikan dalam tiga aspek utama: pola interaksi kemitraan, kontribusi setiap pihak dalam kemitraan, dan dampak kemitraan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada PKBM Attarbiyah, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

Pola Interaksi Kemitraan

Pola interaksi kemitraan antara PKBM, dunia industri, dan pemerintah teridentifikasi dalam bentuk hubungan simbiosis mutualisme. PKBM bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki oleh dunia industri dan pemerintah. Dunia industri memberikan kontribusi dalam bentuk pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi dan menyediakan akses pasar bagi produk peserta didik. Sementara itu, pemerintah mendukung dengan regulasi, kebijakan pendanaan, serta penyediaan infrastruktur.

Kontribusi Setiap Pihak dalam Kemitraan

PKBM memfasilitasi pelatihan kewirausahaan melalui modul interaktif, program mentoring, dan pengadaan peralatan praktik. Modul pelatihan mencakup pembuatan produk, manajemen usaha, dan pemasaran digital. Data wawancara menunjukkan bahwa 80% peserta didik merasa terbantu dengan pelatihan ini, terutama dalam memahami konsep kewirausahaan dasar.

Dunia industri, dalam hal ini perusahaan lokal di bidang agribisnis, memberikan pelatihan teknis terkait produksi dan akses ke teknologi terkini. Pihak industri mengadakan workshop pengemasan produk berbasis teknologi modern yang diikuti oleh 25 peserta didik. Selain itu, mereka memberikan akses ke jaringan distribusi lokal untuk menjual produk yang dihasilkan oleh peserta didik.

Pemerintah berperan dalam menyediakan pendanaan serta dukungan regulasi yang mempermudah operasional program. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pelatihan tambahan bagi pengelola PKBM untuk meningkatkan kompetensi manajerial mereka.

Kontribusi masing-masing pihak ini dirangkum dalam Tabel 1 di bawah ini:

Table 1. Contributions of Each Stakeholder in the Partnership

Stakeholder	Contributions
PKBM	Facilitation of entrepreneurship training, provision of interactive modules, mentoring, and equipment procurement
Industrial Partners	Technical training, provision of access to technology, distribution networks
Government	Funding provision, supportive policies, additional training for PKBM administrators

Dampak Kemitraan terhadap Pemberdayaan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kemitraan ini berhasil meningkatkan pendapatan peserta didik sebesar rata-rata 30% setelah mereka mengikuti program pelatihan selama enam bulan. Sebanyak 75% peserta didik berhasil membuka usaha baru, terutama di sektor makanan dan kerajinan tangan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mendukung teori kolaborasi multipihak yang diusulkan oleh Leydesdorff (2020), yang menyatakan bahwa kemitraan antara komunitas, industri, dan pemerintah merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi tersebut terbukti mampu menciptakan dampak nyata pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan.

Pola Kemitraan sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi

Pola interaksi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PKBM memainkan peran strategis sebagai penghubung. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Pellu (2024), yang menyebutkan bahwa lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM memiliki potensi besar untuk menjadi katalisator perubahan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti kurangnya keselarasan jadwal antara dunia industri dan PKBM. Solusi yang diusulkan adalah pengembangan jadwal yang fleksibel dan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah sebagai penengah.

Kontribusi Multipihak dalam Meningkatkan Produktivitas

Dunia industri memainkan peran krusial dalam memberikan akses ke teknologi terkini, yang memungkinkan peserta didik menghasilkan produk berkualitas tinggi. Kontribusi ini sejalan dengan temuan dari Widodo (2020), yang menunjukkan bahwa keterlibatan dunia industri dapat mempercepat adopsi teknologi oleh masyarakat lokal (Mudhoffar & Magriasti, 2024). Pemerintah juga berperan penting melalui penyediaan regulasi yang mendukung dan dana pelatihan. Studi ini menguatkan pernyataan dari Hendriks (2019) dan Pradhan et al. (2021) yang menekankan bahwa kebijakan pemerintah yang inklusif dapat meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi.

Dampak pada Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif pada kemandirian ekonomi masyarakat. Peserta didik tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di komunitas mereka. Temuan ini relevan dengan penelitian oleh Rashid (2019) yang menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam mengukur dampak jangka panjang program ini. Untuk itu, penelitian lanjutan diperlukan guna mengevaluasi keberlanjutan usaha yang didirikan oleh peserta program.

Urgensi Kolaborasi Multipihak

Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Dengan melibatkan PKBM, dunia industri, dan pemerintah, program pemberdayaan ini menjadi contoh implementasi praktik terbaik dalam konteks lokal.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa model kemitraan PKBM, dunia industri, dan pemerintah memberikan dampak signifikan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menawarkan pola kolaborasi yang dapat direplikasi di wilayah lain. Namun, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi keberlanjutan dampak program ini di masa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai model kemitraan antara PKBM, dunia industri, dan pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan, dapat disimpulkan bahwa implementasi model ini berhasil meningkatkan pendapatan peserta didik sebesar rata-rata 30% setelah mereka mengikuti program pelatihan selama enam bulan. Sebanyak 75% peserta didik berhasil membuka usaha baru, terutama di sektor makanan dan kerajinan tangan, menunjukkan bahwa pelatihan tersebut efektif dalam memfasilitasi pembelajaran keterampilan praktis dan meningkatkan kepercayaan diri peserta untuk menjadi pelaku usaha mandiri. Efektivitas kolaborasi multipihak, yang mencakup peran PKBM sebagai penyedia pelatihan dan mentoring, dunia industri dalam menyediakan akses teknologi dan jaringan pemasaran, serta dukungan dari pemerintah melalui regulasi pendukung dan dana tambahan, telah terbukti membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kewirausahaan. Monitoring dan evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dapat mempertahankan usaha yang dirintis, menunjukkan bahwa keberlanjutan program ini dimungkinkan dan dapat mendukung visi pembangunan masyarakat yang berdaya saing dan mandiri. Berdasarkan keberhasilan ini, disarankan untuk mengimplementasikan model kemitraan serupa secara lebih luas guna memperluas dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alfadri, F. (2023). Peran Quadruple Helix Dalam Meningkatkan Kreatifitas dan Inovasi Industri Kreatif Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(2), 1859–1868.

Ansori, A., Alhadihaq, M. Y., Nuraeni, L., & Estherlita, T. (2024). Community-Based Social Entrepreneurship at Community Learning Centers. *Novateur Publications*, 39–45.

Ansori, A., Hendriana, H., Estherlita, T., Binyati, S., & Westhisi, S. M. (2024). Memperkuat keterampilan market planning: pelatihan soft skill di lembaga kesetaraan. *Abdimas Siliwangi*, *7*(1), 160–172.

Awasthy, R., Flint, S., Sankarnarayana, R., & Jones, R. L. (2020). A framework to improve university–industry collaboration. *Journal of Industry-University Collaboration*, *2*(1), 49–62.

Doh, J. P., Tashman, P., & Benischke, M. H. (2019). Adapting to grand environmental challenges through collective entrepreneurship. *Academy of Management Perspectives*, *33*(4), 450–468.

Galvao, A., Mascarenhas, C., Marques, C., Ferreira, J., & Ratten, V. (2019). Triple helix and its evolution: a systematic literature review. *Journal of Science and Technology Policy Management*, *10*(3), 812–833.

Galvão, A. R., Marques, C. S. E., Ferreira, J. J., & Braga, V. (2020). Stakeholders' role in entrepreneurship education and training programmes with impacts on regional development. *Journal of Rural Studies*, *74*, 169–179.

Hendriks, S. (2019). The role of financial inclusion in driving women's economic empowerment. *Development in Practice*, *29*(8), 1029–1038.

Judijanto, L., Heryadi, D. Y., Sihombing, R. S. M., Gusti, Y. K., & Semmawi, R. (2024). Rekayasa Sosial Ekonomi: Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(1), 223–229.

Leydesdorff, L. (2020). Triple Helix of university-industry-government relations. In *Encyclopedia of creativity, invention, innovation and entrepreneurship* (pp. 2356–2364). Springer.

Majumdar, A. (2022). Thematic analysis in qualitative research. In *Research anthology on innovative research methodologies and utilization across multiple disciplines* (pp. 604–622). IGI Global.

Mudhoffar, K., & Magriasti, L. (2024). Ekonomi Politik Energi Terbarukan: Peluang dan Tantangan di Indonesia. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, *3*(1), 47–52.

Pellu, A. (2024). Peningkatan Akses Keuangan: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *2*(2), 279–295.

Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Nair, M. S., Hall, J. H., & Bennett, S. E. (2021). Sustainable economic development in India: The dynamics between financial inclusion, ICT development, and economic growth. *Technological Forecasting and Social Change*, *169*, 120758.

Rashid, L. (2019). Entrepreneurship education and sustainable development goals: A literature review and a closer look at fragile states and technology-enabled approaches. *Sustainability*, *11*(19), 5343.

Thomassen, M. L., Williams Middleton, K., Ramsgaard, M. B., Neergaard, H., & Warren, L. (2020). Conceptualizing context in entrepreneurship education: a literature review. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, *26*(5), 863–886.

Tohani, E. (2022). Pengembangan Kapasitas Inovasi Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Melalui Pembelajaran Transformatif. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, *8*(1), 425–436.